

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum menunjukkan bahwa variabel transparansi baik, variabel partisipasi cukup baik, variabel akuntabilitas baik, variabel efektivitas cukup baik dan pengelolaan dana desa cukup baik di Desa Lanaus.
2. Variabel transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus.
3. Variabel partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus.
4. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus.
5. Variabel efektivitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
6. Variabel transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
7. Variabel partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
8. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dalam hal ini informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa, baik dalam rapat (MUSDES) maupun dengan cara melalui papan informasi pengumuman di kantor desa, papan proyek di setiap kegiatan dan baliho ditempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat.
2. Memperbaiki dan meningkatkan partisipasi pengelolaan dana desa dengan meningkatkan forum untuk menampung partisipasi masyarakat, meningkatkan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi masyarakat dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
3. Memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui laporan anggaran detail per kegiatan, laporan ini berisi anggaran yang disusun secara detail per kegiatan, dan laporan anggaran detail per rekening anggaran (Buku Besar).
4. Memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dana desa dengan meningkatkan ketepatan dalam menentukan pilihan sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat, meningkatkan ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kegiatan yang dipilih, sedangkan dengan meningkatkan ketepatan sasaran

dengan cara kegiatan yang sudah dipilih dilaksanakan agar mencapai tujuan kegiatan yang telah di tentukan, dan meningkatkan ketepatan waktu dalam pengelolaan dana desa dengan cara pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu atau selesai sebelum mencapai waktu yang telah ditentukan.

5. Pemerintah Desa memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan dana desa dalam hal ini perencanaan, melibatkan seluruh elemen yang ada di desa, mulai dari Perangkat Desa hingga masyarakat turut hadir dalam Musrenbangdes. Meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan dimana setiap kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan pengelolaan belanja dana desa dicatat dalam pembukuan disertai bukti transaksi. Memperbaiki penatausahaan dengan cara pencatatan oleh bendahara desa terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran pada setiap kegiatan. Meningkatkan dan memperbaiki Laporan realisasi pelaksanaan dana desa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa, Laporan realisasi penggunaan dana desa, Laporan kepada badan pemusyawaratan desa, dan Laporan keterangan pertanggungjawaban. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui transparansi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku

Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Abdillah, Willy dan Jogiyanto Hartono. 2016. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI 2016: *Laporan Kinerja Kemendikbud*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bintoro, Tjokro Amidjojo. 1985; *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Devas, Nick 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
-----*. Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia*.
Yogyakarta: BPFE

Hadi, Halim, Abdul, 2006-2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muchlisin Riadi, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Akuntabilitas*. Jakarta: Balai Pustaka

Lalolo krina, Loina.2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Terbit Dan Percetakan Akedemik Manejemen Perusahaan YKPN.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mustopadidjaja AR,. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Kencana. Jakarta.
- Oakley, Peter, et al. 1991-2001. *Projects With People, the Practice of participation in Rural Development*. Geneva : International labour Office.
- Palimbunga, Melda. 2017. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* , Edisi Juli 2017.
- Rasul, Syahrudin.2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sumaryadi. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Soetomo.2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Suharto, Edi, 2006. *Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*: Jakarta: Diklat Kesejahteraan Sosial di Era Globalisasi
- Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell, 1997. *Introducing Public Administration*. New York :Longman
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Yamin dan Heri Kurniawan, (2011), “*Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan partial Least Square Path Modeling*”, Jakarta: Penerbit Salemba Infotek.

Jurnal

Aucoin, P. and R. Heintzman. 2000. The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 66 (1), 45-55.

Ferina, Burhanuddin, dan Lubis. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.4, No. 3.

Faridah, Bambang Suryono, 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4, No. 5

I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-8556 Vol.28 No.1. 132-158

I Putu Julianto Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019) Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmia Akuntansi*. Vol.4, No.1, Hal: 24-42.

Jurniadi, Djumadi, dan DB.Paranoan (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.1,

Mirna Indriani, Nadirsyah, Heru Fahlevi , dan Safrida Putri (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 (1), 2019, 111-130

Made Yeni Latrini, dan Luh Sari Widhiyani (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat PeDesaan. Kabupaten Klungkung yang berjumlah 53 Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. ISSN : 2301 - 8968eISSN : 2303 – 0186. Terapan Vol. 10, No. 2.

- Marschall, 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*. ISSN: 2088-527
- Muhammad Akil Rahman, Memen Suwandi, dan Alfian Hamid. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol.3, No.2
- Mustofa 2012. Pengaruh Pengajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi, Universitas Semarang*. ISSN 2252-6765. Vol. 5. No.2
- Mondong, 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Governance*. Vol 5. No 1
- Matia Andriani. (2019) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa*. Vol.11. No.4
- Mulgan, R. 2000. "Accountability: An Ever-Expanding Concept?". *Journal Public Administration*. Vol. 78. No 5
- Marshall, Graham R, 2000. Participative Planning and Informal Self-Government of Agri Environmental Conflicts: Lesson from a Survey Of Australian Farmers Facing Irrigation Salinity, 7th Ulvon Conference on Environmental Economics, Ulvon, Sweden. *Jurnal Administrasi Publik*. ISSN: 2088-527. Vol. 70. No.2
- Nardi Sunardi dan Rosa Lesmana (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang" *Jurnal Sukirtas*, ISSN: 2581-2777 & ISSN : 2581-2696. Vol 3. No.3
- Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1 (8).
- Pangestu, Ilham Adil, 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh

Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Journal Public Knowledge Project*. Hal. 281-287

Risya Umami, dan Idang Nurodin, 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* [ISSN 20886969] .Vol. 6 Edisi 11,

-----Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* [ISSN 20886969] Vol. 6 Edisi 11

Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. Vol. 8 No, 2.

Sumampouw, Monique. 2004. "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." *Jacob Rais, et al. Jakarta: Pradnya Paramita*. hal. 91-117.

Syaeful Fahri,(2019) Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kabuben, *Jurnal Accounting Analysis*. ISSN 225-6765

Tumbel, Satria Mentari, 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" *E-Jurnal.Unstat* Vol 6, No 1.

Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, *Jurnal WRA*, Vol. 1, No. 1 April, Padang.

Widagdo, Widodo, dan Ismail. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume XIX No. 2.

Tesis

Indri Assgaf, 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang*. Tesis. Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Hartini Tri (2019) *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bantul*. Tesis. Pascasarjana Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang No.28 tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang pengelolaan Dana Desa

PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun.2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No.60 tahun 2014.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah

Peraturan Menteri Keuangan 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengealokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perturan di Desa.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. .

Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.

Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.